

TESIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

*THE EFFECT OF LOCAL REVENUE (PAD),
BALANCE FUND, AND FISCAL STRESS ON FINANCIAL PERFORMANCE
OF LOCAL GOVERNMENTS IN TORAJA UTARA REGENCY*

disusun dan diajukan oleh

**FRANS SULO
A042192038**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

*THE EFFECT OF LOCAL REVENUE (PAD),
BALANCE FUND, AND FISCAL STRESS ON FINANCIAL PERFORMANCE
OF LOCAL GOVERNMENTS IN TORAJA UTARA REGENCY*

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

FRANS SULO

A042192038



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA

*THE EFFECT OF LOCAL REVENUE (PAD),
BALANCE FUND, AND FISCAL STRESS ON FINANCIAL PERFORMANCE
OF LOCAL GOVERNMENTS IN TORAJA UTARA REGENCY*

disusun dan diajukan oleh

**FRANS SULO
A042192038**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 10 Maret 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

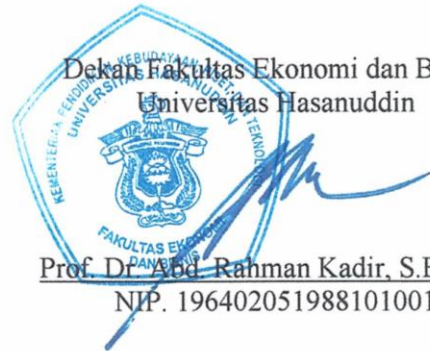
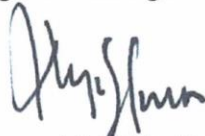


Prof. Dra. Hj. Dian A.S. Parawansa, M.Si., Ph.D.
NIP. 196204051987022001

Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Frans Sulo
NIM : A042192038
Jurusan/program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN
FISCAL STRESS TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Maret 2023

Yang menyatakan,


Frans Sulo
10AKX358551955

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Toraja Utara*" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Keuangan Daerah di Universitas Hasanuddin.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir dari program magister ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya di antaranya:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada jenjang Magister pada Program Studi Magister Keuangan Daerah di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak. **Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah di Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA**, selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin sekaligus dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam menyempurnakan tesis ini.
4. Ibu **Prof. Dra. Dian A.S. Parawansa, M.Si. Ph.D**, selaku dosen pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang dengan penuh ketulusan telah meluangkan waktu dan pikiran mengarahkan penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
5. Ibu **Dr. Retno Fitrianti, SE. M.Si**, selaku dosen pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan tesis, sehingga dalam proses penulisan tesis dapat berlangsung secara baik dan benar.

6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saran, nasihat, ilmu pengetahuan, dan pengalaman selama ini.
7. Seluruh staf tata usaha Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam proses administrasi.
8. Seluruh staf perpustakaan Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin yang telah memberik kemudahan dalam peminjaman buku yang menjadi literatur dalam studi ini.
9. Ibunda terkasih **Debora Pindan Arung** yang selalu memberikan dorongan untuk selalu belajar dan tetap kuat dalam keadaan apapun;
10. Khusus untuk istri terkasih "*Indah Berlian Akuarifmi*" dan anakku tersayang *Gwenson Datu Allo Sulo* yang dengan sabar, penuh pengertian dan keprihatinan selalu memberikan dorongan pada penulis kearah kemajuan yang lebih baik;

Saya menyadari sepenuhnya dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, penelitian ini masih memiliki kekurangan, namun hal itu tidak akan menghambat kelanjutan proses belajar untuk mendapatkan pengalaman yang berharga.

Oleh karena itu saran, masukan, dan dukungan secara konstruktif akan menjadi sumber yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini. Walaupun demikian, saya berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Rantepao, Maret 2023

Frans Sulo

ABSTRAK

FRANS SULO, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Dian A.S. Pawansa dan Retno Fitrianti).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan *fiscal stress* secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi data tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2009 sampai dengan 2021 sebagai sumber dasar perhitungan untuk variabel dalam penelitian ini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara. Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS Ver.25.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan *fiscal stress* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, *fiscal stress*, kinerja keuangan pemerintah daerah.



ABSTRACT

FRANS SULO. *The Effect of Regional Revenue, Balance Fund, Capital Expenditure, and Fiscal Stress on the Financial Performance of the Regional Government of North Toraja Regency* (supervised by Dian A.S. Parawansa and Retno Fitrianti)

The aim of this study is to determine and analyze the partial effect of regional original revenue (PAD), balance fund, capital expenditure, and fiscal stress on the financial performance of local government in North Toraja Regency. The type of data used in this study was secondary data including data on the realization report of regional budget of the North Toraja Regency from 2009 to 2021 as the basic source of calculation for the variables coming from the Central Statistics Agency (BPS) of North Toraja Regency and the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of North Toraja Regency. The data were processed using multiple linear regression statistical test method with SPSS Ver.25.0. The results of this study prove that regional original revenue, balance fund, and fiscal stress partially have a positive and significant effect on the financial performance of local governments in North Toraja Regency. Meanwhile, capital expenditure has no effect on the financial performance of local government of North Toraja Regency.

Keywords: regional original revenue, balance fund, capital expenditure, fiscal stress, financial performance of local government



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	14
2.1.1 <i>Steward Theory</i>	14
2.1.2 <i>Agency Theory</i>	15
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	19
2.1.5 Dana Perimbangan	21
2.1.6 Tekanan Fiscal (<i>Fiscal Stress</i>)	23
2.2 Tinjauan Empiris	26

BAB III KERANGKA DAN HIPOTESIS	30
3.1 Kerangka Konseptual	30
3.2 Hipotesis Penelitian.....	32
 BAB IV METODE PENELITIAN	 33
4.1 Rancangan Penelitian	33
4.2 Definisi Operasional.....	33
4.3 Jenis dan Sumber Data	35
4.4 Metode Pengumpulan Data	36
4.5. Metode Analisis Data.....	36
4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	36
4.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
4.5.3 Analisis Regresi	38
4.5.4 Uji Kriteria Statistik	39
 BAB V HASIL PENELITIAN	 43
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
5.1.2 Letak Geografis dan Administratif	43
5.1.3 Keadaan Penduduk.....	44
5.1.4 Keadaan Sosial Budaya.....	45
5.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	48
5.3 Uji Asumsi Klasik	50
5.3.1 Uji Normalitas.....	50
5.3.2 Uji Multikolinieritas.....	51
5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	52
5.3.4 Uji Autokorelasi	54
5.4 Pengujian Hipotesis.....	56
5.4.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	56
5.5 Uji Kriteria Statistik	57
5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	57
5.5.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F)	60
5.5.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R ²).....	61

BAB VI PEMBAHASAN	61
6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara	61
6.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	64
6.3 Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ...	66
BAB VII PENUTUP	68
7.1 Kesimpulan	68
7.2 Implikasi	70
7.3 Keterbatasan Penelitian	70
7.4 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Ketergantungan Fiskal Pemda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2021.....	2
1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2021	5
1.3 Dana Perimbangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2021	7
1.4 Realisasi PAD dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2021	9
4.1 Definisi Operasional Variabel.....	35
5.1 Statistik Deskriptif	48
5.2 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	51
5.3 Hasil Uji Multikolinieritas	52
5.4 Hasil Uji Autokorelasi	54
5.5 Hasil <i>Uji Run-test</i>	55
5.6 Hasil Perhitungan Regresi.....	56
5.7 Hasil Uji Parsial (Uji-t)	58
5.8 Hasil Uji Simultan (Uji-F)	60
5.9 Hasil Uji Determinasi (R_2).....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual.....	30
5.1 Grafik <i>Scatterplot</i>	53
5.2 Grafik <i>Probability Plot</i>	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, desentralisasi fiskal mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Dalam perkembangan bangsa Indonesia pada masa orde baru berbagai kebijakan seperti sentralisasi diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal secara resmi berlaku mulai 1 januari 2001 berdasarkan UU RI No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan RI No.32 tahun 2004. Menurut UU No.32 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi : Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak (BHP), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaannya untuk membiayai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban ini terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim, 2002). Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah harus

mampu mengelola sumber dayanya terutama sumber daya keuangan secara optimal yang dapat di lihat salah satunya dengan mengukur kinerja keuangan daerah itu sendiri.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari ukuran analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Namun, hingga saat ini masih banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat sehingga belum mampu mandiri dari segi keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara periode 2009-2021 yang diukur dengan rasio ketergantungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Ketergantungan Fiskal Pemda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2021

Tahun	Dana Transfer	Pendapatan Daerah	Persentase
2009	157.522.243.780,00	177.220.949.066,80	88,88%
2010	316.125.386.161,83	399.386.094.837,07	79,15%
2011	372.009.584.812,00	488.116.919.631,82	76,21%
2012	469.048.670.300,54	507.094.586.608,74	92,50%
2013	595.393.439.887,86	621.559.875.695,23	95,79%
2014	686.107.456.548,56	718.221.345.091,50	95,53%
2015	750.631.032.166,94	791.081.953.121,51	94,89%
2016	677.025.597.393,00	873.277.459.288,95	77,53%
2017	711.002.965.149,00	937.099.748.186,12	75,87%
2018	795.904.719.613,00	1.058.775.411.390,30	75,17%
2019	763.972.242.419,00	1.118.131.308.458,12	68,33%
2020	818.017.849.776,00	1.039.254.357.675,43	78,71%
2021	887.435.896.052,00	1.012.666.347.397,38	87,63%
Rata-rata			83,55%

Sumber Data : BPS Kab. Toraja Utara, (diolah 2022)

Dari data pada tabel 1.1, dapat dilihat dalam tiga belas tahun terakhir semenjak dimekarkan rata-rata ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara sebesar 83,55%. Periode dengan rata-rata ketergantungan fiskal tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan ketergantungan fiskal sebesar 95,79%. Rata-rata ketergantungan fiskal yang terendah yaitu tahun 2019 sebesar 68,33%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara masih memiliki ketergantungan fiskal yang

tinggi terhadap pemerintah pusat. Hanya satu periode yaitu tahun 2019 yang memiliki ketergantungan fiskal rendah atau bisa dikatakan saat itu memiliki kemandirian dalam hal keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari desentralisasi yaitu agar daerah dapat mandiri sesungguhnya belum tercapai dikarenakan masih terdapat angka persentase ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Jika suatu daerah masih belum mandiri dalam arti memiliki ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat diharapkan mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien agar menambah jumlah pendapatan daerah salah satunya dengan meningkatkan sektor pendapatan asli daerah serta mengalokasikan dana untuk belanja modal.

Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Y. Leki (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”, menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah masih sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah karena PAD yang dihasilkan relatif sangat kecil. Selain itu rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam pembangunan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Andirfa (2016), menyatakan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Berbeda dengan penelitian Badjra, (2017) menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di provinsi Bali. Secara umum masih terdapat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

Sementara itu, Friska Sihite (2010) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Fiscal Stress* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini disebabkan karena PAD dan Fiscal Stress yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di lain pihak Amrozi (2016) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi pengeluaran anggaran). Hal ini membuktikan bahwa keefisienan suatu pengeluaran tidak sebanding dengan realisasi pendapatan yang diterima karena biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut adanya perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal dapat diteliti lebih lanjut di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, baik dengan

meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan perekonomiannya (Baskara et al., 2018). Kemandirian dalam bidang keuangan di daerah, dapat diusahakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat, yaitu dengan peningkatan penerimaan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah. (Yuliasuti dan Dewi, 2017).

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten/kota yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Toraja Utara merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2008, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. Setelah proses pemekaran, maka kabupaten Toraja Utara diharapkan mampu mengatur keuangan daerahnya.

Secara umum dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, realisasi yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2021

No	Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Persentase
1	2009	5.888.685.000,00	5.809.001.980,80	98,65%
2	2010	9.000.000.000,00	8.282.309.919,69	92,03%
3	2011	12.714.888.450,00	13.555.800.419,00	106,61%
4	2012	18.088.401.950,00	16.614.816.498,20	91,85%
5	2013	19.037.468.221,20	19.824.778.307,37	104,14%
6	2014	22.019.023.868,00	32.113.888.542,94	145,85%
7	2015	39.203.596.900,00	33.808.406.729,57	86,24%
8	2016	41.387.724.280,00	34.896.515.041,55	84,32%
9	2017	66.508.803.000,00	44.165.976.209,12	66,41%
10	2018	58.220.028.100,00	41.975.878.751,30	72,10%
11	2019	56.220.028.100,00	51.882.966.518,99	92,29%
12	2020	77.433.903.735,00	55.672.229.593,93	71,90%
13	2021	57.732.296.542,61	46.186.064.285,50	80,00%

Sumber Data : BPS Kab. Toraja Utara, (diolah 2022)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya mampu meningkatkan PAD pada tahun 2011, 2013 dan 2014. Selanjutnya mengalami penurunan berkesinambungan dari tahun 2009-2012 dan 2015-2021.

Angka Pendapatan Asli Daerah yang masih belum mencapai target yang ditetapkan tersebut memberikan kesan secara kuantitatif masih terjadi kelemahan maupun ketidakmampuan Pemerintah Daerah Toraja Utara dalam mendorong kemandirian daerah. Hal ini disinyalir kuat bahwa kinerja manajerial yang seharusnya mampu ditingkatkan setiap tahun, malah menyisakan suatu indikasi yang belum optimal. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya pengelolaan yang baik melalui keputusan maupun sistem yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara sehingga terwujud tujuan daerah yang solid dan berkesinambungan.

Menurut Halim (2001), permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup

tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut. Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik. Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Secara umum, kondisi mengenai perbandingan antara PAD dan Dana Perimbangan di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2009-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Dana Perimbangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009-2021

No	Tahun	Realisasi Dana Perimbangan	Persentase Kenaikan
1	2009	157.522.243.780,00	-
2	2010	316.125.386.161,83	100,69%
3	2011	372.009.584.812,00	17,68%
4	2012	469.048.670.300,54	26,09%
5	2013	595.393.439.887,86	26,94%
6	2014	686.107.456.548,56	15,24%
7	2015	750.631.032.166,94	9,40%
8	2016	677.025.597.393,00	-9,81%
9	2017	711.002.965.149,00	5,02%
10	2018	795.904.719.613,00	11,94%
11	2019	763.972.242.419,00	-4,01%
12	2020	818.017.849.776,00	7,07%
13	2021	887.435.896.052,00	8,49%

Sumber Data : BPS Kab. Toraja Utara, (diolah 2022)

Berdasarkan tabel diatas, Dana Perimbangan Kabupaten Toraja Utara selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi pada Tahun 2016 mengalami penurunan dari 9,40% menjadi -9,81% lalu di tahun 2017 meningkat kembali menjadi 5,02%. Dan di Tahun 2019 kembali menurun menjadi -4,01%. Selanjut kembali meningkat pada dua tahun terakhir yakni 7,07% untuk tahun 2020 dan 8,49% di tahun 2021.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa perolehan Dana Perimbangan di kabupaten Toraja Utara selalu lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Karena bertahun-tahun PAD dan retribusi ini tidak pernah mencapai target, padahal retribusi ini merupakan kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dan Dana Perimbangan setiap tahunnya selalu meningkat, artinya Kabupaten Toraja Utara masih bergantung kepada Pemerintah Pusat. Dengan tidak tercapainya

target ini akan mempengaruhi struktur APBD. Artinya Kinerja Keuangan Daerahnya harus diperbaiki.

Otonomi daerah adalah ketentuan yang meliputi hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan maupun melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi pemerintah daerah dapat memanfaatkan, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Arnet (2012) menyebutkan bahwa *Fiscal stress* merupakan tekanan anggaran yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Dimana *fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah untuk membiayai berbagai pengeluaran atau belanja daerah.

Berikut ini gambaran realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi belanja daerah di kabupaten Toraja Utara tahun 2009-2021.

Tabel 1.4 Realisasi PAD dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Toraja Utara Tahun 2009-2021

No	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
1	2009	5.809.001.980,80	166.605.040.610,00	28,68%
2	2010	8.282.309.919,69	361.674.275.151,80	43,67%
3	2011	13.555.800.419,00	441.014.005.804,60	32,53%
4	2012	16.614.816.498,20	534.401.357.644,85	32,16%
5	2013	19.824.778.307,37	605.018.377.725,50	30,52%
6	2014	32.113.888.542,94	702.694.675.951,00	21,88%
7	2015	33.808.406.729,57	809.432.359.987,46	23,94%
8	2016	34.896.515.041,55	882.261.499.073,30	25,28%
9	2017	44.165.976.209,12	930.420.467.071,32	21,07%
10	2018	41.975.878.751,30	1.027.592.287.967,00	24,48%
11	2019	51.882.966.518,99	1.092.739.951.498,00	21,06%
12	2020	55.672.229.593,93	1.078.216.920.290,50	19,37%
13	2021	46.186.064.285,50	1.017.128.624.552,41	22,02%

Sumber Data : BPS Kab. Toraja Utara, (diolah 2022)

Mengacu pada realisasi belanja daerah di kabupaten Toraja Utara menunjukkan kenaikan belanja daerah setiap tahun yang mengidentifikasi adanya fenomena *fiscal stress* dimana untuk mendanai pengeluaran yang ada, pemerintah daerah masih harus bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Melihat fenomena yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Toraja Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara?

2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah *fiscal stress* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara.
2. Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara.
3. Pengaruh fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengetahuan atas pemahaman terhadap akuntansi sektor publik khususnya dalam menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Sekaligus sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah, memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun berdasarkan pada buku pedoman penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Sistematika penulisan proposal disajikan ke dalam tujuh bab.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkajinya dari berbagai sumber baik penelitian-penelitian terdahulu sehubungan dengan judul sehingga menghasilkan hipotesis dan digambarkan di kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III : Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Menguraikan kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV : Metode Penelitian

Menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data. Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.

Bab V : Hasil Penelitian

Menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang diuraikan dalam metodologi penelitian yang terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI : Pembahasan

Menguraikan dan membahas hasil analisis data penelitian sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

Bab VII : Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian serta saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Stewardship Theory*

Pengertian *stewardship theory* menurut Donalson dan Davis (1997) : *Stewardship Theory* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal.” *Stewardship Theory* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi bahwa manajemen dipandang sebagai pihak yang memiliki integritas tinggi dan mampu melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna memnuhi kebutuhan *stakeholder*.

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donalson dan Davis, 1989, 1991 dalam Raharjo, 2007). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007)

Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah (Morgan, 1996; Vans Slyke, 2006 dan Thorthon, 2009) dan non profit lainnya (Vargan, 2004; Caer Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dan *principals*. Dilihat dari Sistem Organisasi Pemerintah Rakyat berperan sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut konteks lain, politisi dapat disebut juga *principles* karena menggantikan peran rakyat.

Kaitan dari teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu bagaimana pemerintah selaku manajer (*steward*) yang diberikan kepercayaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat dan melaksanakan pengelolaan dengan baik.

Tugas selanjutnya yaitu melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat mengerahkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya secara maksimal supaya mencapai kualitas laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna (*stakeholder*).

2.1.2 Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency Theory atau teori keagenan berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Di organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten selalu disibukan dengan salah satu kegiatan utamanya yaitu menyusun anggaran. Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan rakyat.

Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan *utiliti (self-interest)* dalam penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan *budgetary slack* (selisih antara sumber daya yang diperlukan secara efisien dengan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas). Hal ini terjadi dikarenakan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat.

Sementara itu, Masalah keagenan yang timbul di kalangan legislatif (anggota dewan) terjadi dari dua tinjauan perspektif, sebagai prinsipal atas eksekutif dan sebagai agen dengan rakyat (pemilih). Masalah keagenan yang timbul dalam perspektif prinsipal akan cenderung melakukan "kontrak semu" dengan pihak eksekutif karena memiliki *discretionary power*. Dalam proses penyusunan anggaran, pihak legislatif cenderung melakukan "titipan" proyek/kegiatan, hal ini terjadi untuk kepentingan pribadi secara jangka panjang demi menjaga kesinambungan dan mengharumkan nama politisi/anggota dewan. Masalah keagenan anggota legislatif sebagai agen, dimana posisi legislatif sebagai pihak agen dan rakyat/pemilih sebagai pihak prinsipal.

Pihak legislatif sebagai agen akan membela kepentingan rakyat atau pemilihnya, namun seringkali ini tidak terjadi, karena pendelegasian kewenangan rakyat/pemilih terhadap legislatornya tidak memiliki kejelasan aturan. Akibatnya, legislator cenderung menyusun anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongannya dan sekiranya anggaran tersebut dilaksanakan akan menimbulkan *administration corruption*. Jika kondisi di atas terjadi, maka proses penyusunan anggaran APBD yang semestinya akan menghasilkan *outcome* yang efisien dan efektif dari alokasi sumber daya dalam anggaran akan terdistorsi karena adanya perilaku *opportunistik* untuk kepentingan pribadi dan politisi.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Menurut Ibnu Syamsi (1986), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli

daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu kemampuan structural

organisasinya, kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah, Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah (Ibnu Syamsi, 1986).

1. Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah.

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah dalam arti sempit. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, baik yang berupa pendapatan swadaya masyarakat atau swasta maupun

dari pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak/retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sesuai dengan potensinya. (Cipta Jaya, 2008) sumber-sumber tersebut berupa Pajak dan retribusi. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam undang-undang No 34 tahun 2000. yang merupakan penyempurnaan UU No 18 Tahun 1997 dan ditindak lanjuti dengan PPNo 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah kedua hal tersebut adalah sumber yang akan diperoleh dari dan untuk daerah yang sering disebut dengan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel penting dalam kerangka menuju otonomi daerah, otonomi bermakna memerintah sendiri dalam wacana administrasi publik, daerah otonom sering disebut juga sebagai *local self goverment*. Analisa dan penglihatan dari pemerintah daerah sesungguhnya merupakan tuntutan yang mendesak dalam formulasi dan implementasi otonomi daerah terdapat tiga pokok permasalahan yaitu : *sharing of power*, *Distribution of income*, kemandirian sistem managemen di daerah (Warsito, 1999). Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan undang-undang N0 22 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sehingga memberikan peluang yang leluasa untuk mengatur dan melaksanakan

kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang ada dari setiap daerahnya masing-masing (Mardiasmo, 2004).

Sumber pendapatan daerah dapat diartikan baik secara luas maupun sempit. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yaitu perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian sumber pendapatan daerah secara luas meliputi tidak hanya Pendapatan Asli Daerah, tetapi termasuk pula pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat maupun investasi luar daerah serta pendapatan lain-lain yang sah (Sembiring, 2008). Pemberian pemerintah pusat dapat berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah, penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat, dan bagi hasil penerimaan pajak dari pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah bagian dari sumber penerimaan pendapatan daerah yang pemungutannya harus selalu diupayakan agar lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Secara garis besar bahwa Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari beberapa hal yaitu (1) pajak, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relation system), sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat. Sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 (Wiraswasta, Pudjihardjo and Adis, 2018).

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam UU yang sama Pasal 10 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber DBH terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH merupakan hak daerah yang dihasilkan masing-masing daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku atas daerah (Sari, Kepramareni dan Novitasari, 2017).

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah daerah yang dialokasikan dengan tujuan menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Pradita, 2013).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai bantuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya berdasarkan UU yang sama mengenai

Perimbangan Keuangan dan Daerah, termuat penjelasan mengenai DAK yang diartikan sebagai dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tertentu. DAK diperuntukkan guna menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (Sari, Kepramareni dan Novitasari, 2017).

2.1.6 Tekanan Fiskal (*Fiscal Stress*)

Tidak ada satu definisipun tentang *fiscal stress* yang diterima secara universal (Arnet, 2011). Sehingga dapat dikatakan bahwa para peneliti sering menciptakan definisi sendiri untuk mengakomodasi fokus penelitian atau memodifikasi definisi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya antara lain Jimenez 2009, Rubin and Willoughby 2009, Sobel and Holcombe 1996a, Maag and Merriam 2007, Alm et al 1993, Rubin 1982 (Arnett, 2011). *Fiscal stress* merupakan ketidakmampuan pemerintah (daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjangnya termasuk kemampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya (Arnett, 2011).

Fiscal stress dapat diindikasikan ketika pengeluaran daerah dalam hal ini belanja modal mengalami peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress* (Shamsud dan Akoto, 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengurangi terjadinya *fiscal stress*, pemerintah daerah harus mengurangi laju pertumbuhan pengeluaran sejalan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Di mana *fiscal stress* semakin tinggi apabila adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan pribadi (potensi dalam daerah) untuk membiayai

pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah yang berpotensi dan kesiapan daerah dalam mengelolanya menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab terjadinya *fiscal stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, antara lain:

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.
2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *fiscal stress*. Kemunduran industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan *fiscal stress* (Yu dan Korman, 1987).
3. Menerangkan *fiscal stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol. Sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan sebagai penyebab *fiscal stress* (Ginsberg, 2004).

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kemandirian daerah, maka diharapkan daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini, PAD merupakan wujud komponen utama pembiayaan daerah yang sangat ideal untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan daerah. Namun semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, pemerintah daerah mengalami hambatan. Keberadaan undang-undang tersebut seringkali dinilai menjadi disinsentif bagi daerah, karena membatasi daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak-pajak daerah.

Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsud dan Akoto, 2004). Sehingga, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya pajak (*Tax Effort*) adalah diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) pajak daerah dengan PDRB (Saruc dan Sagbas, 2008). Upaya pajak menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam hal ini merupakan seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Upaya pajak yang tinggi dapat mencerminkan tingkat *fiscal stress* yang lebih besar. Di mana permintaan jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada. Jika PDRB suatu daerah mengalami peningkatan, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat.

Ada tiga pendekatan yang umum digunakan dalam mengukur kesehatan fiskal (Bahl, 1984), yaitu:

1. Pendekatan pertama ditekankan pada posisi surplus atau defisit (pendapatan dikurangi pengeluaran).
2. Pendekatan kedua untuk membandingkan pemerintah daerah yang didasarkan pada penetapan indikator tekanan fiskal (indikator ekonomi, sosial, demografi, dan indikator keuangan).
3. Pendekatan ketiga memfokuskan pada indikator tekanan keuangan.

Berbeda halnya dengan yang dikaji oleh Arnett (2011), terdapat 5 (lima) kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah, yaitu: defisit anggaran (*budget deficits*), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget*

balance), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*) dan rasio keuangan (*financial ratios*).

Dapat disimpulkan *Fiscal Stress* merupakan kondisi kritis keuangan daerah dimana penerimaan daerah tidak mampu menutupi pengeluaran yang ada sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat dapat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya yang ada.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran untuk mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Yuliasti Leki: *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.*

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), belanja modal (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), dan secara bersama-sama pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) di Kabupaten Halmahera Barat.

2. Eka Sintala Dewi Anjani: *Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio Kemandirian. Penelitian ini juga

menghasilkan PAD berpengaruh terhadap Belanja modal, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga membuktikan belanja modal dapat memediasi hubungan antara PAD dan Kinerja Keuangan Daerah. Implikasi penelitian ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pendapatan daerah, terutama pengelolaan PAD untuk belanja modal yang dapat menyentuh langsung kepada pelayanan publik.

3. Sri Mulyani, Hardiyanto Wibowo: *Pengaruh Belanja Modal , Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015.*

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Variabel intergovernmental revenue, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

4. Frisca Sihite: *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara.*

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Fiscal Stress berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) negatif terhadap Kinerja Keuangan.

5. Heri Zulfikri: *“Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung”.*

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Untuk derajat desentralisasi fiskal, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah terdapat perbedaan pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah, sedangkan Kabupaten Lampung Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Barat tidak terdapat perbedaan

pada sebelum dan sesudah otonomi daerah. Untuk kapasitas fiskal, dimana Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Utara terdapat perbedaan kinerja keuangan pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah, hanya pada Kabupaten Lampung Barat saja yang tidak terdapat perbedaan pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. Sedangkan untuk kebutuhan fiskal, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah terdapat perbedaan pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah, sedangkan Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Barat tidak terdapat perbedaan pada sebelum dan sesudah otonomi daerah.

6. Fisa Aprilia Muhayanah: *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013”*.

Hasil model penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; (2) Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; (3) Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

7. Novita Riyani: *“Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013”*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) tingkat kemandirian keuangan Propinsi Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan daerahnya sangat baik. Rata-rata rasio kemandirian diperoleh sebesar 322,74% yang artinya Propinsi Jawa Timur telah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya. 2) tingkat desentralisasi fiskal Propinsi Jawa Timur menunjukkan sangat baik, dengan

diperoleh rata-rata sebesar 70,80%. 3) tingkat efektivitas pemerintah Propinsi Jawa Timur telah mencapai target, dengan diperoleh rata-rata sebesar 111,53% yang artinya Propinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan sangat efektif. 4) tingkat efisiensi pengeluaran belanja terhadap pendapatan memiliki perolehan rata-rata sebesar 99,25% yang memiliki kecenderungan kurang efisien, artinya suatu bentuk pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal tidak cermat sehingga menjadi tidak tepat sasaran. 5) hasil analisis kemampuan keuangan daerah menunjukkan share rendah sedangkan growth tinggi, dari hasil yang diperoleh berdasarkan metode kuadran, Propinsi Jawa Timur berada pada posisi kuadran II, yaitu menunjukkan kondisi yang masih belum ideal.

8. Eviniar Nugraheni: *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis”*

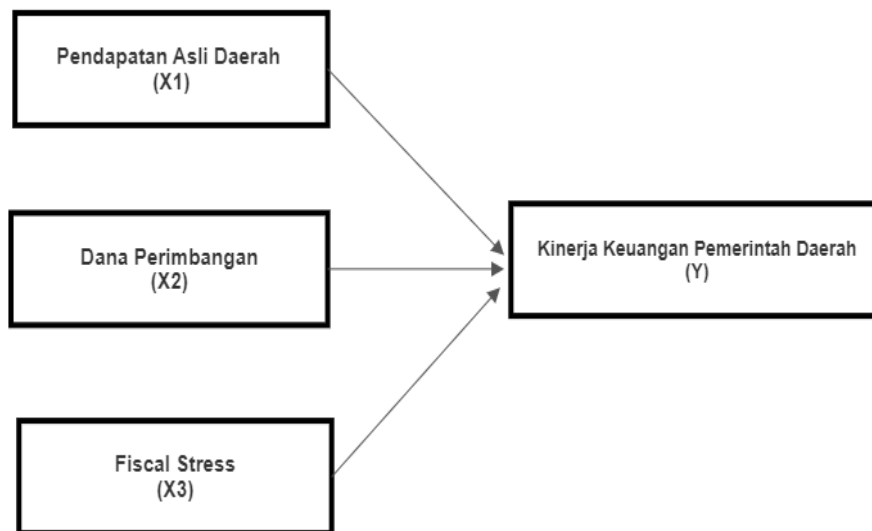
Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima faktor yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, pendapatan pajak daerah dan temuan audit. Disisi lain, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan ukuran legislatif tidak terbukti merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penjelasan pada bab sebelumnya maka variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan *Fiscal Stress* (X3). Sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Keterkaitan antara variabel dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini.

Gambar 3.1



Pendapatan Asli Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jumlah dan kenaikan pendapatan asli daerah dalam setiap tahun anggaran akan menunjukkan keberhasilan kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian yang dilakukan Leki, et al (2018) menunjukkan

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan Sihite (2010) bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Penelitian Andirfa, et al (2016) menunjukkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sejalan dengan Julitawati, et al (2012) dan penelitian Budianto dan Alexander (2016).

Fiscal stress merupakan tekanan fiskal akibat keterbatasan penerimaan daerah sebagai akibat dari adanya tuntutan kemandirian daerah. Pada saat *fiscal stress* tinggi akan cenderung menurunkan tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah, sehingga pemerintah daerah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Sihite (2010) menyatakan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan Sartina (2011) yang menyatakan *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.

3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Mudrajad Kuncoro (2013), merupakan “suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi”. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti dan akan diuji kebenarannya melalui sebuah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. *Fiscal stress* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.